



## OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMKOT MASIH RENDAH

# Perlu Himpun Data Potensi Pajak dan Cek

## Kepatuhan Wajib Pajak

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Perkembangan rencana aksi pencegahan korupsi di Pemkot Yogyakarta selama tahun 2018 baru mencapai 66 persen dari intervensi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 8 aspek intervensi pencegahan, aspek optimalisasi pendapatan daerah capaiannya paling rendah yakni 16 persen.

"Optimalisasi pendapatan daerah sangat rendah karena belum ada data base wajib pajak. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pemkot agar capaiannya lebih baik," kata Satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah 5 Jateng DIY NTB Kunto Ariawan, dalam monitoring evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi di Balikota Yogya, Kamis (21/2).

Dia menjelaskan, beberapa hal untuk memperbaiki capaian pencegahan korupsi pada optimalisasi pendapatan daerah yakni pemkot harus memiliki data potensi-potensi pajak dan daftar wajib pajak. Selain itu perlu dilakukan cek kepatuhan pajak dari para wajib pajak.

"Potensi pajak di kota lebih besar dibandingkan di provinsi. Di kota di antaranya ada pajak bumi dan bangunan, hotel dan restoran. Cek kepatuhan pembayaran pajak-pajak itu," tambahnya.

Sedangkan aspek pencegahan lainnya perencanaan dan penganggaran



Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memberikan penjelasan didampingi satgas Pencegahan KPK Unit Koordinasi Wilayah 5 Jateng DIY NTB.

APBD pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu manajemen aparatur sipil negara, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya secara umum realisasi rencana aksi pencegahan korupsi Pemkot Yogyakarta yang baru mencapai 66 persen kebanyakan karena belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan,

penganggaran, pengadaan dan pencatatannya. Misalnya pada perencanaan dan penganggaran APBD, capaian baru 50 persen karena belum terintegrasinya sistem informasi manajemen (SIM) pokok pikiran dari DPRD setempat dengan SIM musrenbang dan SIM di organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pada pengadaan barang dan jasa

lebih bagus tahun lalu. Semua program harus masuk SIRUP pada 31 Januari. Tujuannya biar transparan dan masyarakat tahu pengadaan-pengadaan yang dilakukan pemerintah," terangnya.

Untuk pelayanan terpadu satu pintu PTSP Pemkot Yogyakarta, diakui-nya sudah tertinggal dari kota atau kabupaten lain. Hal ini jadi kendala, walaupun pernah menjadi PTSP rujukan nasional. Dia menuturkan pelayanan satu pintu tapi tetapi masih banyak jendela karena izin teknis masih dilayani instansi teknis. Sementara untuk kapabilitas APIP terkendala kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi audit.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan, pemkot berupaya melakukan integrasi sejumlah sistem informasi manajemen antarinstansi. Sinergi antarinstansi dan fokus dalam menyusun program. Selain itu membangun rencana kerja dan memonitoring sejauh mana realisasinya. Hal-hal tersebut menjadi upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan pemkot.

"Sistem yang terintegrasi agar memudahkan pengawasan dan masyarakat bisa mengakses serta ikut memantau. Proses integrasi sistem ini yang menjadi PR. Semua organisasi perangkat daerah harus bisa menyesuaikan diri," tandas Heroe. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005